



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;  
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: [kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id)

---

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN  
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJKN, dibantu oleh Kantor Wilayah sebagai PPID Tingkat II dan KPKNL sebagai PPID Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Balikpapan sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website KPKNL Balikpapan dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan).

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dan pengguna layanan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Balikpapan secara cepat dan efisien permohonan layanan informasi KPKNL Balikpapan dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut.

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Front Office Bersama (FOB) Kementerian Keuangan Balikpapan.
- b. Surat elektronik melalui [kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknbalikpapan@kemenkeu.go.id).
- c. Pesan teks Aplikasi Whatsapp melalui nomor 0851 9067 1301.
- d. Panggilan telepon melalui nomor (0542) 763408.

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Balikpapan dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Balikpapan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 4 (empat) orang pelaksana.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selamat tahun 2025, KPKNL Balikpapan tidak menerima permintaan informasi publik dengan rincian pelayanan permintaan informasi publik sebagai berikut.

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

## Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

## 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pemberian Layanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala berarti dalam pemberian layanan informasi publik pada internal maupun eksternal.

## 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntunan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* dan Pengguna Layanan di lingkup KPKNL Balikpapan, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan.

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif.
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital.
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi pada Seksi Hukum dan Informasi.
- d. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas kegiatan yang dianggap perlu dipublikasi melalui media publikasi pada portal website maupun media sosial.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL BALIKPAPAN  
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di KI	Isi Sengketa Informasi KI	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa KI	Hasil Putusan Sengketa KI	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Informasi Publik Diberikan Sebagian	Informasi Publik Ditolak	Termasuk Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai										
NIHIL																									



Ditandatangani secara elektronik  
**Adi Suharna**

